

Pengaruh Sistem Akuntansi Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Indonesia

Dinda Putri Nazira

Universitas Syiah Kuala

Email: dindaptrnazira@gmail.com

***Abstract.** The presence of the accounting field in an economic study has the aim of recording and collecting and reporting information related to the use of financial position and the existence of a cash flow that occurs. Without real accounting, the recording of all efforts related to finance, especially for companies and governments, will be uncontrollable. This is because the presence of a record-based accounting will provide in-depth information about the presence of a financial use and to see how the financial condition is. The purpose of this study is to see what influence the local government accounting system has on the quality of local government financial reports in Indonesia. Then this research is also aimed at knowing clearly about what influence is given by the local government accounting system so that it causes an increase or decrease in the quality of local government financial reports in Indonesia.*

***Keywords:** Accounting, Economics, Local Government.*

Abstrak. Hadirnya bidang akuntansi di dalam sebuah kajian ekonomi memiliki tujuan untuk melakukan sebuah pencatatan maupun mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait penggunaan keuangan posisi keuangan dan adanya sebuah arus kas yang terjadi. Tanpa adanya akuntansi sejatinya pencatatan terhadap segala upaya yang berkaitan dengan keuangan terutama bagi perusahaan maupun pemerintahan akan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan kehadiran dari sebuah akuntansi yang berbasis pencatatan akan memberikan informasi secara mendalam mengenai hadirnya sebuah penggunaan keuangan serta untuk melihat Bagaimana kondisi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh apa saja yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga ditujukan agar mengetahui secara jelas mengenai pengaruh apa yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah sehingga menyebabkan hadirnya peningkatan ataupun penurunan dari adanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Akuntansi, Ekonomi, Pemerintah Daerah.

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan kita sejatinya terdapat berbagai bidang yang ditunjukkan untuk dapat menyokong segala aktivitas yang terjadi. Berbagai bidang ini akan saling berkesinambungan untuk dapat menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik. Berbagai bidang secara garis besar yang ada di dalam kehidupan kita diantaranya adalah agama, budaya, sosial, politik serta hadirnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi ataupun keuangan sebenarnya merupakan salah satu bidang yang paling penting setelah bidang perpolitikan untuk menunjang bagaimana kehidupan bisa berjalan secara maksimal. Ekonomi memiliki pengertian sebagai sebuah ilmu yang ditujukan untuk mempelajari mengenai bagaimana sebuah upaya mencukupi kehidupan dengan kebutuhan yang tidak terbatas Melalui penggunaan sumber daya secara terbatas.

Kajian mengenai ekonomi jika melihat dari sebuah kaca mata yang lebih luas sebenarnya tidak hanya menyangkut mengenai hadirnya sebuah kehidupan secara personal melainkan juga bisa ke dalam tempat yang lebih luas. Seperti misalnya dalam hal ini bagi kehidupan yang ada di sebuah negara seperti layaknya di Indonesia. Ekonomi tidak serta merta dijadikan sebagai bidang yang berhubungan hanya dengan uang dan kebutuhan hidup namun juga mencakup adanya hal lain seperti layaknya akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan sistem hitung menghitung dan suatu hal yang digunakan di dalam bisnis. Akuntansi secara tepat dan memungkinkan akan membuat manajemen sebuah perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik. Menurut Wedgyant, Kiesso, dan Kimmel akuntansi merupakan sebuah bagian dari sistem informasi yang diberlakukan untuk mengidentifikasi sebuah catatan dalam upaya untuk mengkomunikasikan insiden ekonomi pada sebuah organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Akuntansi sendiri juga dianggap sebagai sebuah upaya untuk dapat mengatur serta mengelola transaksi keuangan yang terjadi baik itu untuk perusahaan maupun bagian bidang lainnya seperti pemerintahan. Sebenarnya banyak yang beranggapan bahwa akuntansi berkuat pada bidang perusahaan Namun nyatanya ini juga memiliki peranan sangat penting di dalam sebuah pemerintahan.

Hadirnya bidang akuntansi di dalam sebuah kajian ekonomi memiliki tujuan untuk melakukan sebuah pencatatan maupun mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait penggunaan keuangan posisi keuangan dan adanya sebuah arus kas yang terjadi. Tanpa adanya akuntansi sejatinya pencatatan terhadap segala upaya yang berkaitan

dengan keuangan terutama bagi perusahaan maupun pemerintahan akan tidak terkendali. Hal ini dikarenakan kehadiran dari sebuah akuntansi yang berbasis pencatatan akan memberikan informasi secara mendalam mengenai hadirnya sebuah penggunaan keuangan serta untuk melihat Bagaimana kondisi keuangan. Sehingga nantinya mampu menjadi acuan untuk menentukan langkah berikutnya dalam hal perekonomian atau keuangan.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas dan didasarkan oleh hadirnya hukum untuk mengatur segala aktivitas di dalamnya. Di mana hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan mengenai negara Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka hadirnya segala sesuatu yang ada di negara Indonesia harus didasarkan kepada hadirnya hukum yang mengatur secara sah dan jelas ataupun pasti agar tidak ada perilaku yang menyimpang. Pemerintah Indonesia menurut hukum yang sah menyatakan bahwa harus ada pembagian mengenai kekuasaan dari pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan ataupun bidang akuntansi terhadap perekonomian atau keuangan mereka secara pribadi agar nantinya tidak membebankan pemerintah pusat maupun bisa memberikan informasi secara lebih spesifik. Hadirnya kekuasaan daerah untuk dapat menentukan pengeluaran beserta dengan pencatatan pengeluaran tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan adanya demokrasi di Indonesia dan pembagian kekuasaan ataupun desentralisasi.

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan, maka kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah memiliki arti sebagai sebuah rangkaian sistematis dan prosedur maupun penyelenggaraan Serta peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi yang dimulai dari analisis transaksi sampai dengan hadirnya pelaporan keuangan yang bersifat akurat di Lingkungan organisasi pemerintah daerah. Dian disambung oleh hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mendefinisikan bahwa sistem akuntansi pemerintahan atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data terhadap transaksi yang dilakukan, pencatatan hingga pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dari operasi pemerintah. Berdasarkan adanya berbagai definisi yang telah disebutkan menurut undang-undang

tersebut, maka sebenarnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang ditujukan untuk melakukan pencatatan dan pengawasan mengenai transaksi maupun laporan posisi keuangan dari sebuah pemerintah daerah.

Hadirnya bidang akuntansi yang ada di setiap wilayah di Indonesia khususnya bagi pemerintah daerah maka sejatinya ini bertujuan untuk dapat menciptakan adanya laporan keuangan. Sebab walaupun Indonesia sendiri menganut adanya sistem desentralisasi atau pelimpahan wewenang sehingga ada pemerintahan daerah yang mana nantinya tidak bergantung kepada pusat namun dari segi perekonomian maupun hal-hal lain masih terdapat banyak sekali subsidi dan hal yang diurus oleh pemerintah pusat. Sehingga hal ini menjadikan Adanya pembagian perekonomian oleh pemerintah pusat melalui pendapatan nasional untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Sebagai timbal balik dari adanya hal tersebut maka pemerintah daerah wajib untuk memberikan laporan keuangan baik itu pengeluaran, kondisi serta posisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat itu. Hal ini ditujukan untuk dapat melihat seberapa besar potensi perekonomian sebuah daerah maupun adanya masalah di daerah tersebut mengenai keuangan.

Hadirnya sebuah laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri agar nantinya tidak dapat upaya penyelewengan dan penggunaan uang rakyat untuk kepentingan secara pribadi. Laporan keuangan secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah laporan yang berisi informasi keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan proses akuntansi yang mana dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan terutama hal ini bagi pihak eksternal. Ini cukup sama dengan apa yang ada di pemerintah daerah di mana hadirnya laporan keuangan ini secara akuntansi ditujukan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah untuk nantinya memberikan laporan kepada pihak eksternal yakni pemerintah pusat. Dari segi laporan keuangan sejatinya juga terdapat beberapa unsur-unsur ataupun standar-standar tertentu agar nantinya bisa memiliki sebuah kredibilitas dan kualitas yang baik dari laporan tersebut. Mengingat dalam hal ini menurut sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat beberapa standar-standar tertentu seperti manajerial akuntabilitas serta adanya pengawasan. Pada akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya kehadiran dari

sistem akuntansi pemerintah daerah ditunjukkan untuk dapat membuat kualitas dari laporan keuangan yang ada di sebuah daerah meningkat.

Sebuah sistem diciptakan ataupun dihadirkan di dalam sebuah kehidupan pasti memiliki tujuan tersendiri. Di mana tujuan tersebut pastilah bersifat positif untuk dapat menciptakan hadirnya sebuah kemajuan di dalam pelaksanaan berbagai hal termasuk dalam hal ini akuntansi ditujukan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap hadirnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia?
2. Apa pengaruh yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap hadirnya peningkatan maupun penurunan dari adanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai pengaruh apa yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah sehingga menyebabkan hadirnya peningkatan ataupun penurunan dari adanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Agar nantinya dapat diketahui mengenai bagaimana kondisi sebenarnya dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia dari sisi luaran yang dihasilkan.

Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang nantinya diharapkan setelah dilakukan penelitian ini:

1. Diharapkan nantinya melalui penelitian ini mampu untuk memberikan informasi mengenai pengaruh yang diberikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

2. Diharapkan nantinya setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh apa yang berikan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap hadirnya perubahan kualitas keuangan pemerintahan daerah.

TINJAUAN TEORI

Bidang ekonomi ataupun keuangan merupakan salah satu bidang yang sangat penting di tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Bidang ini memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi mengingat hadirnya ekonomi atau keuangan dalam kehidupan kita menjadi suatu hal yang sentral untuk mengurus segala permasalahan yang ada. Akan dipengaruhi oleh Bagaimana keuangan ataupun ekonomi. Untuk itu maka terkait bidang ekonomi diperlukan adanya berbagai upaya yang tepat untuk mengatasi segala kendala agar nantinya bisa berjalan secara maksimal. Salah satu turunan dari bidang ekonomi adalah akuntansi di mana ini berhubungan dengan adanya pencatatan untuk melaporkan serta memberikan arahan mengenai bagaimana alokasi dana. Tujuan dari adanya akuntansi ini adalah untuk bisa melakukan pencatatan terhadap keuangan dari sebuah perusahaan ataupun daerah maupun negara agar nantinya bisa diketahui seberapa besar alokasi dana untuk hal-hal yang diperhatikan serta langkah- langkah selanjutnya yang perlu untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara berkembang yang mana dari sisi ekonomi ataupun keuangannya masih cukup mengalami beberapa kekurangan. Di mana kekurangan yang cenderung dimiliki oleh negara Indonesia adalah kurangnya integritas dari Masyarakat khususnya para pekerja yang berada pada jajaran pegawai negeri sipil yang bertugas dalam mengurus masalah terkait keuangan. Tak jarang dari mereka banyak yang melakukan tindakan korupsi ataupun menyimpang dan berakibat fatal. Bahkan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan jumlah koruptor yang paling banyak. Salah satu hal lain yang juga menjadi permasalahan serius selain Korupsi adalah integritas yang masih kurang dan rasa malas untuk bekerja serta tidak adanya standar untuk menetapkan mengenai akuntansi dan laporan keuangan membuat banyak dari para pekerja yang cenderung meremehkannya.

Seperti dalam hal ini misalnya adalah kasus laporan keuangan yang dibuat oleh beberapa daerah dengan tidak rinci ataupun lewat dari tenggang dan batas waktu. Kurangnya regulasi dan pengaturan mengenai standar akuntansi pemerintah khususnya

bagi pemerintah daerah menjadikan hadirnya laporan keuangan tampak tidak terlalu diperlukan. Untuk itu maka masalah yang muncul di sini adalah pemerintah Indonesia memerlukan adanya standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang kemudian dibuat berdasarkan hadirnya peraturan perundang-undangan. Namun kemudian masalah baru muncul kembali yakni mengenai efektifitas dari hadirnya sebuah standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan setelah adanya pembentukan standar tersebut.

Pertanyaan dan masalah kedua ini muncul karena pada beberapa keadaan Masih ditemukan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal dari pemerintah daerah. Seperti misalnya ditemukan di wilayah kabupaten Bandung oleh salah satu penelitian bahwa hadirnya standar akuntansi pemerintah daerah tidak banyak memberikan perubahan terhadap hadirnya kualitas laporan keuangan yang mengalami peningkatan. Karena berdasar kepada masyarakat ataupun para pekerja yang masih belum terlatih dan tidak memiliki integritas yang kuat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bidang akuntansi merupakan salah satu bagian yang penting di dalam sebuah perekonomian. Di mana bidang akuntansi sendiri merupakan sebuah pencatatan yang membahas secara dalam mengenai laporan keuangan dari alokasi serta pendapatan maupun pengeluaran keuangan atau perekonomian sebuah daerah atau sebuah negara. Di Indonesia sendiri sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Terbitlah sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai rangkaian sistematis dari sebuah prosedur, penyelenggara peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di Lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi melalui dari pengumpulan data, pencatatan, pengisi saran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi pemerintah. Hadirnya sebuah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki beberapa tujuan tersendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap Bagaimana luaran yang diberikan. Tujuan pertama adalah manajerial. Tujuan ini menjelaskan bahwa akuntansi

pemerintah akan mampu untuk memberikan sebuah informasi yang bersifat keuangan untuk perencanaan penganggaran serta pelaksanaan dan pemantauan maupun pengendalian anggaran dari kinerja pemerintah. Sistem ini nantinya akan berfungsi sebagai sebuah rekam jejak dari sistem manajerial akuntansi yang berlaku.

Tujuan kedua adalah akuntabilitas. Tujuan ini berhubungan dengan adanya sebuah kewajiban moral serta hukum yang terdapat di dalam sebuah pemerintahan dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat serta berguna bagi pihak yang bertanggung jawab dan berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah sehingga tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus mempertanggungjawabkan perhitungan atas laporan keuangannya. Tujuan terakhir adalah pengawasan, akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien di mana hal ini ditujukan untuk menghindari adanya penggunaan anggaran di luar rencana belanja dan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sejatinya juga memiliki beberapa fungsi yang mana diantaranya adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran serta kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar untuk pengukuran kinerja serta untuk menentukan adanya ketaatan terhadap konsep otorisasi anggaran yang ditujukan untuk akuntabilitas. Kemudian fungsi yang kedua adalah sistem akuntansi pemerintah diharapkan mampu menyediakan informasi mengenai keuangan yang nantinya berguna untuk perencanaan dan pengelolaan maupun pengendalian kegiatan keuangan secara efisien. Fungsi ketiga adalah sap diharapkan dapat berfungsi untuk menyediakan informasi terpercaya tentang posisi keuangan cara menyeluruh. Serta fungsi yang terakhir adalah sistem akuntansi pemerintah diharapkan dapat menjaga aset melalui pencatatan pemrosesan serta pelaporan keuangan yang konsisten Sesuai dengan standar dan praktek akuntansi umum.

Dalam hal ini penyelenggaraan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah nantinya akan menghasilkan adanya laporan keuangan. Sesuai dengan bagaimana konsep luaran dari adanya sebuah akuntansi yakni laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada catatan informasi keuangan suatu perusahaan ataupun badan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja dari perusahaan ataupun badan tersebut. Sehingga dalam hal ini laporan keuangan dibutuhkan untuk nantinya menentukan seberapa besar kebutuhan dan pendapatan serta apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan lebih mengefisiensi pengeluaran.

Sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah di beberapa wilayah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Seperti salah satunya telah terjadi pelaksanaan secara maksimal mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung. Kemudian ditemukan bahwa hadirnya sebuah penerapan yang maksimal ini mampu untuk menciptakan hadirnya kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Di mana sejak hadirnya sebuah sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih rinci dan spesifik serta terjamin akuntabilitasnya. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah nyatanya memiliki pengaruh terhadap Bagaimana sebuah laporan keuangan bisa memiliki kualitas yang lebih baik (Nelly dan Aprianus,2010). Hasil ini juga didukung oleh riset yang telah dilakukan oleh Mitha Astuti pada tahun 2019 mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Di mana hadirnya sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh sebesar 77,8% terhadap hadirnya sebuah laporan keuangan yang lebih baik

Namun dalam penelitian mengatakan bahwa sebuah sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Di mana Pemerintah Daerah hanya mengandalkan sistem Pengendalian internal yang bersifat positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Ataupun dapat dikatakan bahwa hadirnya sebuah sistem ini tidak merubah apapun dari Bagaimana kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia. Melainkan yang bisa mengubah hal ini hanyalah sebuah pengendalian secara internal bagaimana para masyarakat ataupun orang-orang yang bekerja di bidang keuangan mengimplementasikan hal ini secara mendalam (Kartika & Harjanti,2020).

Sehingga berdasarkan beberapa hal tersebut bisa diketahui jika sebuah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap sebuah laporan keuangan daerah. Dimana sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah atau sistem yang berbasis kepada informasi nantinya akan memberikan sebuah pengaruh terhadap hadirnya peningkatan dari kualitas laporan keuangan. Peningkatan ini didasarkan kepada rasa pengetahuan dari

pelaksana ataupun pekerja yang berada di tingkat pemerintah daerah akan Bagaimana sebuah laporan keuangan seharusnya menjadi lebih baik dengan berbagai penerapan hal-hal yang ditujukan untuk akuntabilitas serta kepiawaian dalam hal laporan keuangan. Namun, sebuah laporan keuangan tampaknya juga tidak akan terpengaruh oleh sistem akuntansi daerah ataupun sistem informasi akuntansi daerah jika tidak ada kompetensi yang diberikan oleh para pegawai. Di mana pengetahuan seorang pegawai tampak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dari Bagaimana kualitas laporan keuangan yang meningkat akibat adanya sistem akuntansi daerah. Namun secara keseluruhan ini mengalami peningkatan karena adanya sebuah sistem baru yang mengharuskan beberapa hal.

PEMBAHASAN

Kontribusi yang diberikan Sistem Akuntansi Daerah

Melalui pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, hadirnya sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah dipercaya mampu untuk meningkatkan adanya kualitas laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Di mana dalam hal ini diketahui beberapa poin-poin yang memang menjadi tolak ukur dari bagaimana hal ini akan bisa berjalan secara maksimal nantinya untuk meningkatkan hadirnya sebuah kualitas laporan keuangan. Poin yang paling penting di sini adalah kompetensi dari para pekerja yang ada di bidang terkait. Sehingga nantinya mereka mampu untuk menjadikan Bagaimana program yang dibuat ini mampu untuk diterapkan dan diimplementasikan secara maksimal di tengah hadirnya sebuah sistem akuntansi ataupun pencatatan bagi pemerintah daerah.

Pada bagian ini poin pembahasan yang akan difokuskan adalah mengenai hal-hal apa saja yang berasal dari sistem akuntansi daerah yang kemudian memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Poin pertama yang dianggap memiliki kontribusi adalah sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah mengharuskan adanya penyiapan informasi yang bersifat akurat ataupun tepat waktu. Sehingga dalam hal ini kemudian para pelaksana tugas ataupun karyawan yang bekerja di instansi pemerintah keuangan daerah akan merasa lebih tertantang dan memiliki tanggung jawab lebih untuk menyelesaikan tugas mereka secara tepat waktu. Kemudian laporan secara gamblang juga diwajibkan dalam hal ini sehingga laporan keuangan akan lebih rinci untuk menentukan

ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan pengukuran kinerja. Apabila sebelumnya tidak ada standar mengenai bagaimana akuntansi atau pelaporan dari sebuah keuangan daerah, maka nantinya ini akan meningkatkan Bagaimana laporan menjadi lebih rinci dan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Perubahan kedua didasarkan kepada tanggung jawab yang lebih tinggi di mana terdapat adanya akuntabilitas yang ditunjukkan dari pembentukan sistem akuntansi ini. Sehingga nantinya para pekerja ataupun karyawan dipekerjakan untuk membentuk sebuah laporan keuangan akan merasa lebih Riskan jika membuat laporan yang terasa kurang baik. Yang pada akhirnya mereka akan lebih memperhitungkan dan mempertimbangkan adanya sebuah akuntabilitas serta kebenaran dari adanya laporan keuangan mereka. Namun kembali lagi poin ini harus dikembalikan bagi para pekerja serta penerapan sebuah sistem akuntansi daerah yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab kompetensi serta keyakinan dari tiap-tiap karyawan akan berpengaruh terhadap Bagaimana sebuah sistem ini bisa memberikan kontribusi khususnya dari segi akuntabilitas.

Rekomendasi

Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil analisa yang telah didapatkan adalah standar akuntansi pemerintah daerah tampak belum diterapkan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Padahal sebenarnya kehadiran dari standar ini bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang didasarkan kepada akuntabilitas dan dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi berkat adanya beberapa regulasi untuk para akuntan mempertanggungjawabkan mengenai apa yang telah mereka tuliskan pada laporan keuangan. Sehingga sebenarnya masalah baru yang perlu untuk digarisbawahi adalah implementasi yang masih kurang di beberapa wilayah di Indonesia. Di mana cenderung mereka tidak menggubris adanya sebuah standar yang baru mengenai akuntansi pemerintah daerah dan malah cenderung mengabaikan adanya hal tersebut. Untuk itu maka rekomendasi yang paling tepat dalam hal ini adalah mengadakan pelatihan dan penyuluhan serta workshop secara rutin kepada para akuntan yang bekerja di instansi pemerintah daerah.

Kegiatan yang bertajuk kepada pelatihan dan pemberian edukasi kepada para pekerja ini ditujukan untuk dapat memberikan mereka pemahaman secara lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan standar-standar akuntansi pemerintah daerah.

Sebab dengan adanya standar yang diimplementasikan maka nantinya bisa membuat hadirnya kualitas laporan keuangan di Indonesia khususnya dari sisi pemerintah daerah menjadi lebih baik. Latihan ini bisa diberikan dengan cara penyuluhan secara bertahap mengenai standar-standar akuntansi keuangan daerah yang nantinya juga bisa memberikan adanya kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Meskipun pemerintah juga harusnya bisa bertanggung jawab dalam mengadakan upaya untuk pelatihan dari setiap pekerja agar nantinya mereka bisa lebih mengetahui mengenai seluk beluk laporan keuangan yang baik dan benar. Agar nantinya tidak terjadi permasalahan kembali mengenai kualitas laporan keuangan yang masih belum maksimal. Terakhir pihak pemerintah juga perlu untuk membuat adanya sebuah regulasi yang lebih baik agar bisa meningkatkan ketertiban dan integritas dari para pekerja agar tidak membuat adanya hal-hal yang bisa merugikan bagi negara.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai hadirnya pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah sebuah laporan keuangan dipengaruhi dari segi kualitas oleh sistem akuntansi daerah. Dimana hal ini ditunjukkan dari sisi peningkatan yang mendasar kepada fungsi serta tujuan dari pembentukan sistem akuntansi daerah. Namun di sisi lain kehadirannya tidak bisa secara maksimal jika tidak ada kompetensi dari para karyawan. Kesimpulan kedua terkait apa yang memberikan perubahan dapat dikatakan bahwa sebuah akuntabilitas Serta adanya standar-standar untuk memberikan sebuah laporan secara rinci dan tepat waktu menjadikan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Saran

Setelah melakukan adanya bahasan dan ditemukan sebuah kesimpulan maka penulis berpendapat bahwa kehadiran dari pelatihan bagi para karyawan sangat penting untuk meningkatkan adanya implementasi dari sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap sebuah peningkatan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Apandi, R. N. N., & Fajar, A. (2010). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *aset*, 386.
- Patra, A. D. A., Bustami, L., & Hasriani, H. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 2(1).
- Permadi, A. D. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1- 16.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan daerah (studi empiris pada dinas perhubungan kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1855 - 1869.